

**ANALISIS PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



Nama : Fira Ari Kusmira
NIM : 22 2017287

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021**

SKRIPSI

**ANALISIS PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Program Starata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Fira Ari Kusmira
NIM : 22 2017287**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fira Ari Kusmira
NIM : 222017287
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Dalam Menilai Kinerja Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan

Dengan ini Saya Menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakabeneran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini seta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2021

Yang Menyatakan,


Fira Ari Kusmira

40AIX340323562

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Perbandingan Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dalam Menilai Kinerja
Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Nama : Fira Ari Kusmira
NIM : 222017287
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Pembimbing I.

Diterima dan Disahkan
Palembang, Agustus 2021
Pembimbing II.

Dr. Drs. Supardi, SE, M.Si
NIDN/NBM: 0296046303/784921

Welly, SE, M.Si
NIDN: 0212128102/1085022

Mengetahui,
Dekan

u.b Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Betri, S.E., Ak., M.Si, CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

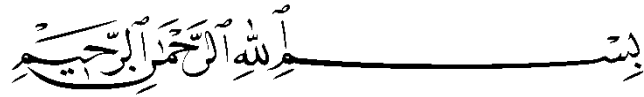
Motto

- ❖ *"Janganlah selalu membayangkan hasil yang besar, tapi mulailah dengan berusaha. walaupun hasilnya kecil tetapi nyata hasilnya"*
- ❖ *"Hargailah perjuangan orangtuamu yang bersusah payah untuk mengkuliahkan, hanya untuk melihat kita menjadi seseorang yang bermanfaat bukan orang hebat di kalangan masyarakat"*
- ❖ *"Jangan menuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi menuntut dirimu karena menunda adabmu kepada Allah"*

Terucap syukur kepada Allah SWT,

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada

- ❖ *Kedua Orang tuaku Tercinta yang selalu memberikan semangat dan motivasi*
- ❖ *Adik ku tersayang*
- ❖ *Dosen – Dosen FE'B*
- ❖ *Teman Seperjuanganku*



PRAKATA

Assalamualaikum Warahmattullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Analisis Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dalam Menilai Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Akuntansi Program Strata Satu (S1) Universitas Muhammadiyah Palembang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Semua kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada ayahku Sugito dan Ibuku Khoriyah yang telah mendidik, membiayai, mendoakan dan memberikan semangat serta kasih sayang yang begitu besar dan luar biasa kepada penulis, karena penulisan skripsi ini tidak akan pernah terjadi tanpa bimbingan dari kedua orangtuaku. Serta saudara, adik yang tak hentinya memberikan dukungan kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs Sunardi, S.E.,M.Si dan Ibu Welly, S.E.,M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran dan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

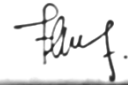
1. Bapak DR. Abid Dzajuli, S.E.,M.M selaku Rektor dan staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E.,M.Si.,Ak .CA dan ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. DRS. Sunardi S.E.,M.Si yang telah membantu membimbing dan mengarahkan terselesaikan skripsi ini.
5. Ibu Welly S.E.,Si selaku dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang telah membantu membimbing dan mengarahkan terselesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Betri, S.E.,M.Si.,Ak .CA selaku penelaah 1.
7. Ibuk Anggrelia Afrida S.E., M.Si Selaku penelaah 2.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kepada keluarga ku tersayang terima kasih telah memberikan dorongan, semangat dan yang tulus
10. Pegawai di Kantor BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penyusunan skripsi ini.

11. Teman- teman Siti Yulina, Mita Tia Ayu Lestari, Elliza Charollina yang telah memberikan semangat, saling membantu dalam hal apapun.

12. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2017.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan ketebatasan dalam penelitian ini, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Agustus 2021



Fira Ari Kusmira

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	vii
HALAMAN DAFTAR TABEL	viii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRAC.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Landasan Teori	14
1. Kinerja.....	14
a. Pengertian Kinerja.....	14
b. Pengukuran Kinerja.....	15
c. Tujuan Pengukuran Kinerja	16
d. Indikator Kinerja Pemerintah.....	17
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	21
a. Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja.....	21
b. Fungsi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah	23
3. Struktur Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ..	24
4. Laporan Realisasi Anggaran	25

a. Definisi Laporan Realisasi Anggaran	25
b. Indikator Laporan Realisasi Anggaran	27
c. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran	28
d. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran	29
e. Struktur Laporan Realisasi Anggaran	29
B. Penelitian Sebelumnya	30

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Operasionalisasi Variabel	36
D. Data yang di perlukan	37
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	39
1. Analisis Data	39
2. Teknis Analisis Data	39

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	41
1. Sejarah Tentang BPKAD Provinsi Sumatera Selatan	41
2. Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan	42
3. Visi dan Misi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan	46
a. Visi	46
b. Misi	46
4. Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sumatera Selatan ...	46
B. Pembahasan Hasil Penelitian	61
1. Analisis Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Rasio Efisiensi	61
2. Analisis Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Rasio Efektivitas	62
3. Analisis Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Rasio Efektivitas	64

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 67
B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Selatan.....	8
Tabel 1.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Selatan.....	10
Tabel II. 1	Kriteria Penilaian Efisiensi.....	19
Tabel II. 2	Kriteria Penilaian Efektivitas	19
Tabel II. 3	Kriteria Penilaian Kemandirian.....	20
Tabel II. 4	Penelitian Sebelumnya	33
Tabel III.1	Operasional Variabel.....	36
Tabel IV.1	Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	47
Tabel IV.2	Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	49
Tabel IV.3	Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	51
Tabel IV.4	Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	52
Tabel IV.5	Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	53
Tabel IV.6	Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	55
Tabel IV.7	Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	57

Tabel IV.8	Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah Provinsi	
	Sumatera Selatan.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1	Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan ...	45
Gambar IV.2	Rasio Efisiensi	56
Gambar IV.3	Rasio Efektivitas	58
Gambar IV.4	Rasio Kemandirian	60

ABSTRAK

Fira Ari Kusmira / 222017287 /2021 / Analisis Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

tujuan untuk mengetahui perbandingan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dalam menilai kinerja pemerintah pada badan pengelola keuangan aset dan daerah (BPKAD) provinsi sumatera selatan. penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif. tempat penelitian dilakukan di kantor badan pengelola keuangan aset dan daerah (BPKAD) provinsi sumatera selatan. data yang digunakan yaitu data sekunder. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. metode analisis data yang digunakan dengan teknik analisis kuantitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menilai kinerja pemerintah (1) tingkat efisiensi anggaran pendapatan dan belanja provinsi sumatera selatan anggaran tahun 2016 sebesar 91,06% (tidak efektif), pada anggaran tahun 2017 sebesar 89,89% (tidak efektif), pada tahun 2018 sebesar 91,07% (tidak efektif), dan pada tahun 2019 sebesar 89,77% (tidak efektif). (2) tingkat efektivitas anggaran pendapatan dan belanja provinsi sumatera selatan tahun 2016 sebesar 94,05% (tidak efektif), pada tahun anggaran 2017 sebesar 91,97% (tidak efektif), anggaran tahun 2018 sebesar 99,40% (tidak efektif) dan tahun anggaran 2019 sebesar 94,23% (tidak efektif). (3) tingkat kemandirian anggaran pendapatan dan belanja provinsi sumatera selatan anggaran pada tahun 2016 sebesar 38,67% (rendah), anggaran pada tahun 2017 sebesar 36,98% (rendah), anggaran tahun 2018 sebesar 38,59% (rendah), dan anggaran tahun 2019 sebesar 37,66% (rendah).


Kata Kunci : laporan realisasi anggaran, kinerja keuangan pemerintah

Abstract

Fira Ari Kusmira/222017287/2021/The Analysis of the Realization of the revenue and Expenditure budget in assessing the performance of the South Sumatra provincial government

The aim is to compare the realization of the revenue and expenditure budget in assessing the government's performance at the Regional and Asset Financial Management Agency (BPKAD) in the province of South Sumatra. This study uses a type of comparative research, where the research was conducted at the office of the Regional and Asset Financial Management Agency (BPKAD) of South Sumatra Province. the data used is secondary data. The data collection technique used in this research is documentation. data analysis method used with quantitative analysis techniques. the results show that by assessing the government's performance (1) the efficiency level of the revenue and expenditure budget of the province of south sumatra, the 2016 budget is 91.06% (ineffective), in the 2017 budget it is 89.89% (ineffective), in 2018 by 91.07% (ineffective), and in 2019 by 89.77% (ineffective). (2) the level of effectiveness of the revenue and expenditure budget of the province of South Sumatra in 2016 was 94.05% (ineffective), in the 2017 fiscal year it was 91.97% (ineffective), the 2018 budget was 99.40% (ineffective) and the 2019 fiscal year by 94.23% (ineffective). (3) the level of independence of the income and expenditure budget of the province of South Sumatra, the budget in 2016 was 38.67% (low), the 2017 budget was 36.98% (low), the 2018 budget was 38.59% (low), and the 2019 budget of 37.66% (low).

Keywords: budget realization report, government financial performance

NO	NAMA	NIM	KETERANGAN
A106	Fira Ari Kusmira	22 2017287	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirbala yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan untuk meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya meningkatkan kenyamanan dan keamanan mutu pendidikan, kesehatan maupun keimanan.

Pemerintah Daerah diberikan hak dan wewenang untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri dalam mengatur penerimaan maupun pengeluaran keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Pemberian wewenang pada pemerintah daerah ini diharapkan mampu memberikan motivasi untuk lebih mengembangkan potensi-potensi daerah yang dimiliki dengan tujuan memajukan perekonomian daerah serta meningkatkan pelayanan publik pada masyarakat.

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, nilai

dan visi organisasi. Secara umum juga dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian, 2010: 329). Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi dalam strategi planning suatu organisasi (Mahsun, 2013: 25). Kinerja (*Perfomance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi (Putra, 2018: 45)

Permendagri No.13 Tahun 2006 menyebutkan pengertian kinerja adalah keluaran/hasi dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah sehingga dapat dilihat apakah pemerintah daerah telah berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan unuk memenuhi tiga maksud yang pertama, pengukuran kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya

dan pembuatan keputusan. ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo 2018 :150)

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya menggunakan rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode anggaran dibandingkan dengan anggaran periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis ini dapat menilai kemandirian suatu pemerintahan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah dan mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya (Putra, 2018: 60).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dijadikan tolak ukur dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, Pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kesemua aspek dari struktur ekonomi daerah yang disusun harus berorientasi pada pencapaian tingkat kerja secara ekonomis, efisien dan efektif (*value for money*). Ekonomis berkaitan dengan penilaian dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah, efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, dan efektif

berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target dan tujuan untuk kepentingan publik.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan dan Undang-undang No.1 tentang perbendaharaan menegaskan atas pelaksanaan APBD, kepada daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan kerangka konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan (Erlina, 2015: 23). Unsur-unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Masing-masing unsur dapat dijelaskan yaitu, Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah. Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/akan diterima kembali. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Sebagai salah satu instansi pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan alamat di Jl. Kapten Arivai No. 3 di Palembang adalah untuk urusan pemerintah di bidang keuangan yang menjadi wewenang di kota Palembang. dalam Visi misi BPKAD adalah terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendukung Sumsel Sejahtera lebih maju dan berdaya saing internasional serta menciptakan kehandalan laporan keuangan dan pengamanan aset daerah, menciptakan pelayanan prima keuangan dan aset daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan tentu memiliki tugas dan fungsi dalam BPKAD terdiri enam bagian Bidang dan dua belas Sub Bagian Pengelola dan Aset Daerah yang bertugas yaitu Kepala Badan, Bidang Sekretariat,

Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, dan Bidang Milik Daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Anastasia, dkk (2015) melakukan penelitian yang berjudul analisis kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada dinas pendapatan kota manado. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pada pertumbuhannya negatif yaitu sebesar -12,3%. Pertumbuhan belanja kota manado fluktuatif, pada rasio belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap total belanja mengalami total belanja masih relatif kecil yaitu sebesar 33% dibandingkan dengan rasio belanja rutin yang sebesar 66,9%, pada rasio belanja operasi dan rasio belanja terhadap total belanja mengalami total belanja.

Fransiskus, dkk (2016) dengan judul Analisis Kinerja Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua. Hasil Penelitian ini menunjukkan selama tahun 2013-2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat memanfaatkan anggaran belanja dengan baik dimana realisasi belanja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten asmat lebih kecil dari anggaran yang telah direncanakan. Dari beberapa analisis yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat sudah menunjukkan hasil yang positif dalam kinerja belanja. namun pemerintah daerah lebih mempertimbangkan dimana belanja yang di dalamnya mengenai kepentingan umum harus lebih ditingkatkan.

Ruliaty (2019) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Mengukur Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian pemerintah daerah kabupaten bone dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat masih sangat rendah dan bahkan mengalami naik turun dari tahun ke tahun.

Fajriansyah dkk (2019) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kinerja keuangan pendapatan daerah pemerintah Kota Bitung dilihat dari analisis varian dan pertumbuhan dapat dikategorikan baik, sedangkan untuk analisis rasio keuangan dinilai tidak baik. kinerja keuangan belanja daerah pemerintah kota bitung dilihat dari analisis varians dan pertumbuhan dikatakan baik, sedangkan untuk analisis rasio keserasian belanja operasi dapat dikategorikan baik serasi sehingga rasio keserasian belanja modal kurang serasi. Sebaiknya pemerintah Kota Bitung dapat meningkatkan PAD dengan memaksimalkan potensi-potensi yang ada sehingga tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat.

Penelitian yang dilakukan oleh Eka, dkk (2020) yang melakukan penelitian yang berjudul Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan berdasarkan analisis tingkat ekonomi tahun 2013-2017 yaitu bervariasi tingkat ekonomi rata-rata sebesar 89,48% dengan kriteria cukup

baik. tingkat efisiensi pada badan pendapatan daerah kabupaten OKU meningkat dari tahun ke tahun rata-rata tingkat efisien tahun 2013-2017 sebesar 62,58% dengan kriteria efisien karena realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah, tahun 2013-2017 sebesar 114,39% dengan kriteria sangat efektif hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mencapai anggaran pendapatan yang telah ditetapkan oleh badan pendapatan daerah kabupaten OKU sudah sangat efektif.

Berikut informasi mengenai Anggaran Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Berikut :

Tabel I.1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2016-2019

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2016	Pendapatan Asli Daerah	3.093.908.308.589,91	2.546.177.544.348,66	82,3
	Pendapatan Transfer	3.903.416.698.202,00	4.022.114.607.509,00	103
	Lain-lain pendapatan yang sah	1.933.010.000,00	14.488.777.818,67	749,5
	Total	6.999.258.016.791,91	6.582.780.929.676,33	94,05
2017	Pendapatan asli daerah	3.165.360.996.225,00	3.031.633.624.303,95	95,78
	Pendapatan Transfer	5.729.688.002.984,00	4.061.113.371.545,00	70,88
	Lain-lain pendapatan yang sah	16.427.780.200.71	1.103.221.135.951,01	6.715,58
	Total	8.911.476.779.409,71	8.195.968.131.799,00	91,97
2018	Pendapatan asli daerah	3.449.590.628.837,14	3.528.010.712.183,54	102,3

	Pendapatan Transfer	5.741.436.384.299,00	5.577.767.500.414,00	652,8
	Lain-lain pendapatan yang sah	5.451.911.320,00	35.593.182.502,25	652,86
	Total	9.196.477.924.456,14	9.141.371.395.099,79	99,40
2019	Pendapatan Asli Daerah	3.436.828.903.746,55	3.496.147.585.514,73	101,7
	Pendapatan Transfer	6.381.903.769.000,00	5.765.176.417.582,00	90,33
	Lain-lain pendapatan yang sah	31.210.170.000,00	21.054.801.615,00	67,46
	Total	9.849.942.842.746,55	9.282.378.804.711,73	94,23

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2021

Tabel I.1 menunjukkan bahwa tahun 2016-2019 dapat dilihat secara absolut dari realisasi total pendapatan pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan. Tetapi dilihat pada tahun terakhir mengalami fluktuatif sebesar 9.282.378.804.711,73. Dilihat dari realisasi tahun 2016 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 2.546.177.544.348,66, pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar 4.022.114.607.509,00, lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan sebesar 14.488.777.818,67. Pada realisasi tahun 2017 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 3.031.633.624.303,95, pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar 4.061.113.371.545,00, lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan sebesar 1.103.221.135.951,01, pada tahun 2018 realisasi pendapatan asli daerah mengalami kenaikan 3.528.010.712.183,54,

pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar 5.577.767.500.414,00, lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan sebesar 35.593.182.502,25, Tahun 2019 dilihat dari realisasi pendapatan asli mengalami kenaikan sebesar 3.496.147.585.514,73, pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar 5.765.176.417.582,00, lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan sebesar 21.054.801.615.

Tabel I.2
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2016-2019

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2016	Belanja operasi	3.650.152.269.188,7	3.486.550.395.731,7	95,52
	Belanja Modal	846.142.303.821,20	607.740.926.745,28	71,82
	Belanja tidak Terduga	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00
	Total Belanja Daerah	4.496.474.573.009,91	4.094.471.321.477,03	91,06
2017	Belanja operasi	4.631.655.652.295,00	4.410.377.592.244,00	95,22
	Belanja Modal	1.806.367.818.574,00	1.377.382.678.423,59	76,22
	Belanja tidak terduga	1.500.000.000,00	5.788.552.526.667,59	52,82
	Total Belanja Daerah	6.439.523.470.869,00	5.788.552.526.667,59	89,89
2018	Belanja operasi	5.730.234.643.508,00	5.226.350.947.402,94	91,21
	Belanja Modal	1.690.535.413.549,95	537.275.105.768,15	90,93
	Belanja tidak terduga	6.000.000.000,00	134.480.200,00	2,24
	Total Belanja Daerah	7.426.770.057,95	6.763.760.533.371,09	91,86
2019	Belanja	6.140.097.371.311,47	5.494.913.456.747,11	89,49

	operasi			
	Belanja Modal	1.820.168.210.865,27	1.652.799.376.582,26	90,80
	Belanja tidak terduga	6.000.000.000,00	4.071.125.143,00	67,85
	Total Belanja Daerah	7.966.265.582.176	7.151.783.949.472	89,77

Sumber, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2021

Tabel I.2 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 91,06%, pada tahun 2017 realisasi anggaran belanja mengalami penurunan sebesar 89,89% dari tahun sebelumnya, tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 91,86% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 89,77%.

Wijayanti (2015) menyatakan Penggunaan dana alokasi umum (DAU) diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prioritas, kepentingan, dan kebutuhan daerah masing-masing yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Walaupun, pemerintah daerah telah memperoleh dana transfer dari pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan namun hal tersebut belum dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan fenomena tentang kinerja pemerintah provinsi, yang mana realisasi anggaran belum sesuai dengan dana yang telah dianggarkan. Karena belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan maka penulis tertarik untuk menganalisis perbandingan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dalam menilai kinerja pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan. fenomena yang terjadi dan hasil penelitian terdahulu yang masih berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :
“Analisis Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini bagaimanakah Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Sebagai bukti empiris dalam menganalisis perbandingan kinerja pemerintah provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran yang dapat memberikan informasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian

2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan tata kelola keuangan agar menghasilkan sebuah laporan keuangan yang tepat dan akurat

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi serta dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan yang menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anatasia Friska Pailingan, dkk. (2015). Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendapatan kota Manado. Jurnal Emba, Vol. 3 No. 1 Maret 2015. Hal :17 25.
- Bastian, Indra. 2010. **Akuntansi sektor Publik Suatu Pengantar**. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Darise, N. 2012 **Akuntansi Keuangan Daerah**, Jakarta: PT Indeks.
- Diah Isnaini Fitriah, dkk. 2019. **Metodologi Penelitian Bisnis**. NoerFikri Palembang.
- Eka, dkk. 2020. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten.
- Erlina, Omar Sakti Rambe dan Rasdianto, 2015. **Akuntansi Keuangan Daerah: Berbasis Akrua**, Salemba Empat, Jakarta.
- Fajriansyah, Yudi, Elim, Inggriani, dan Waladouw, Stenly Kho. 2019. Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. Jurnal Emba, Vol. 7 No. 3, 2019 : 4465-4474.
- Fransiskus, dkk. 2016. Analisis Kinerja Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua. Vol. 4 No.3.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. (2012) **Akuntansi Keuangan Daerah**. Edisi 4. Jakarta. Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. **Teori, Konsep, dan Aplikasi Sektor Publik**. Jakarta : Salemba Empat.
- Noerdiawan, Deddi Hertianti, ayuningtyas (2014) **Akuntansi Sektor Publik**. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Mahsun, M. (2013). **Pengukuran Kinerja Sektor Publik** . Yogyakarta : BPF.
- Mardiasmo. 2018. **Akuntansi Sektor Publik**. Andi Yogyakarta.
- Moeheriono. 2012. **Indikator Kinerja Utama (IKU) Perencanaan, Aplikasi dan Pengembangan**. Cetakan Ke-2, Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Paramitha, dkk. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.

Pratiwi, P. D (2020). Analisis Belanja Modal Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2013-2018: Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok (*Doctoral Dissertation*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia.2003. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Jakarta.

Putra Windhu. 2018. **Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah**. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (<http://pih.kemlu.go.id> diakses 17 Desember 2020).

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 1. Tentang Perbendaharaan. id.slideshare.net/atambua/uu-no-1-tahun-2003

V. Wiratna Sujarweni (2020) **Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi**. Pustakabarupress.

Wijayanti, Y., & MM, A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Dearah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014